Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial
Vol.2, No.2, Agustus 2026
e-ISSN: 3109-9157

Demokrasi: Keterlibatan Jaringan Organisasi Dalam Proses Seleksi Komisioner KPU Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat 2023-2028

Daffa Fakhri Al Kautsar[1], Aidinil Zetra[2], Doni Hendrik[3]
[123]*Departemen Ilmu Politik, FISIP Univesitas Andalas*
daffafakhrialkautsar@gmail.com , aidinilzetra@soc.unand.ac.id , hendrik_doni@yahoo.com

Submit : 04-05-2026 Accepted : 15-07-2026
Review : 10-06-2026 Published : 30-08-2026

Abstrak
Organisasi memainkan peran penting dalam seleksi komisioner KPU di Sumatera Barat periode 2023-2028. Lima anggota panitia seleksi dan komisioner KPU terpilih masing-masing memiliki latar belakang organisasi, dan terdapat kesesuaian antara latar belakang organisasi panitia seleksi dan komisioner KPU. Individu yang terlibat dalam jaringan organisasi dianggap memiliki koneksi dan jaringan politik yang kuat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan jaringan organisasi dalam proses seleksi komisioner KPU periode 2023-2028 di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat jaringan politik organisasi dan rekomendasi dari organisasi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap seleksi komisioner KPU di Sumatera Barat periode 2023-2028. Aktor dalam jaringan ini adalah (1) calon komisioner KPU, (2) panitia seleksi, (3) tokoh organisasi, (4) komisioner KPU, dan (5) partai politik. Jaringan politik dalam penelitian ini adalah jaringan desentralisasi. Selain itu, jaringan organisasi cenderung lebih condong ke rekomendasi dari organisasi lain, tetapi ada organisasi yang memberikan rekomendasi di luar organisasi mereka dan ada unsur ketertarikan untuk memberikan rekomendasi kepada para komisioner KPU.
Kata kunci: *Jaringan, Organisasi, Seleksi, Komisioner KPU*

Abstract
Organizations play an important role in the selection of KPU commissioners in West Sumatra for the 2023-2028 period. 5 members of the selection committee and the elected KPU commissioners each have organizational backgrounds, and there is compatibility between the selection committee's organizational background and the KPU commissioners'. Individuals involved in organizational networks are perceived to have strong political connections and networks. The purpose of this research is to describe the organizational network in the selection process of KPU commissioners for the 2023-2028 period in West Sumatra. This research uses a qualitative approach with a case study method. The results of this research prove that there is an organizational political network and recommendations from organizations that have a significant influence on the selection of KPU commissioners in West Sumatra for the 2023-2028 period. The actors in this network are (1) KPU commissioner candidates, (2) the selection team, (3) organizational figures, (4) KPU commissioners, and (5) political parties. The political network in this study is a decentralized network. Furthermore, the organizational network tends to lean more towards recommendations from fellow organizations, but there are organizations that provide recommendations outside of their organization and there are elements of interest in providing recommendations for KPU commissioners.
Keywords: *Network, Organization, Selection, KPU Commissioners*

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara demokrasi di mana rakyat memegang kekuasaan. Hal ini tercantum dalam Konstitusi 1945, Pasal 1 Ayat 2, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan Konstitusi. Selain diabadikan dalam Konstitusi 1945, sistem demokrasi juga dianggap sebagai sistem yang paling stabil dan relevan untuk digunakan di Indonesia (Nastain & Nugroho, 2020: 13). Sebagaimana dinyatakan oleh Robert Dahl, yang menggambarkan demokrasi sebagai sistem politik di mana anggota/warga negaranya saling memandang sebagai setara dalam hal politik, dan mereka secara kolektif berdaulat serta memiliki semua kemampuan, sumber daya, dan lembaga yang mereka butuhkan untuk mengatur diri mereka sendiri (Firdaus, Sulaeman, & Zakaria, 2024: 4). Kedaulatan rakyat berarti bahwa kekuasaan tertinggi di negara dipegang oleh rakyat dan semua kebijakan mengenai keputusan pemerintah didasarkan pada hasil musyawarah bersama dengan rakyat (Rizal, 2017).

Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan, yang dikenal sebagai prinsip kedaulatan rakyat. Sebagai negara demokrasi, Konstitusi 1945 menetapkan adanya pemilihan umum (pemilu). Dalam menerapkan praktik demokrasi Indonesia, di mana kedaulatan suatu negara dipegang oleh rakyat, perlu diadakannya pemilihan umum, yang merupakan pemberian hak kepada rakyat untuk berpartisipasi langsung dalam kehidupan politik negara. Salah satu indikator pemilihan umum yang demokratis adalah adanya partisipasi dan kontestasi politik yang bebas dan adil. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan kesempatan bagi seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam politik. Pasal 22E Ayat 1 Konstitusi 1945 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa pemilihan umum harus diadakan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali (Budiarjo, 2021).

Negara demokrasi membutuhkan partai politik dan pemilihan umum. Keberadaan partai politik dianggap sangat penting karena partai politik tidak hanya menentukan kebijakan pemerintah. Partai politik juga bertujuan untuk menyalurkan dan mewakili kepentingan berbagai kelompok masyarakat. Mark N. Hagopian berpendapat bahwa partai politik adalah organisasi yang dibentuk untuk memengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam kerangka prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktik kekuasaan langsung atau partisipasi publik dalam pemilihan umum (Amal, 1996).

Para pemimpin dipilih melalui pemilihan umum, yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pemilihan seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Penyelenggaraan pemilihan umum diatur dalam Pasal 22E Ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemilihan Umum, yang

menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum nasional, independen, tetap, dan otonom. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 menyatakan bahwa Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum, yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai satu kesatuan fungsi untuk menyelenggarakan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah secara langsung oleh rakyat.

Dalam menjalankan mandatnya untuk menyelenggarakan pemilihan, badan pengelola pemilihan dipimpin oleh beberapa komisioner dengan latar belakang yang berbeda, baik dari segi organisasi maupun wilayah. Lembaga ini dipimpin oleh seorang ketua dan wakil ketua yang mewakili berbagai divisi. Namun, proses perekrutan dan seleksi tidak lepas dari dinamika dan hambatan. Misalnya, beberapa kandidat komisioner direkomendasikan oleh organisasi masyarakat atau organisasi tertentu dan, sampai batas tertentu, juga didukung oleh partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan.

Dinamika rekrutmen seringkali dikaitkan dengan kepentingan elit partai politik. Oleh karena itu, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh pemilihan umum, tetapi juga oleh aktor-aktor institusional yang menyelenggarakannya. Di sinilah rekrutmen komisioner KPU menjadi titik krusial. Dalam sistem kooptasi, yang merupakan bentuk perekrutan orang dari luar kelompok atau organisasi karena keahlian mereka untuk mengisi posisi tertentu dalam struktur birokrasi politik (Septrianingsih, 2017). Dalam jaringan tersebut, terdapat partisipasi organisasi yang menjadi latar belakang terpenting bagi calon komisioner, sehingga terdapat rekomendasi dari tokoh masyarakat yang digunakan sebagai patokan dalam menilai keterbukaan hubungan antar jaringan organisasi dalam proses seleksi (Wahyanto & Djuyandi, 2019: 15).

Proses seleksi dilakukan secara bertahap, dimulai dari tingkat pusat hingga tingkat regional. Banyak anggota KPU memiliki latar belakang di berbagai organisasi. Dari berbagai organisasi tersebut, penelitian ini berfokus pada dua Organisasi Masyarakat (ormas), yaitu, pertama, jaringan alumni dari organisasi mahasiswa atau organisasi pemuda (OKP) yang menonjol sebagai jaringan organisasi, termasuk Himpunan Mahasiswa Muslim Indonesia (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Muslim Indonesia (PMII), dan Himpunan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Kedua, organisasi masyarakat berbasis Islam, termasuk Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Kemampuan jaringan-jaringan ini untuk beradaptasi dengan institusi KPU. Pengalaman-pengalaman ini menjadi landasan untuk memahami bagaimana

hubungan harus dibangun dan strategi kekuatan apa yang harus digunakan untuk mengendalikan situasi.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang ditulis oleh Yusa Djuyandi, Mohammad Firdaus, dan Arief Hidayat (2018), Yudho Wahyanto dan Yusa Djuyandi (2019), Masum Busthomi dan M. Iwan Satriawan (2020), Ros Pratiwi Asnur, Andi Yakub, dan Gustiana A. Kambo (2020), Muh. Alwi Parhanudin dan Miftahul Janah (2023), dan Acep Ridwan Maulana dan Riksa Iqomah (2024). Pada dasarnya, tinjauan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh, kemampuan, peran, relasi kekuasaan, dan dinamika organisasi dalam seleksi komisaris KPU dan Bawaslu. Tinjauan pustaka sebelumnya telah menemukan perbedaan dengan penelitian ini, yang merupakan kebaruan dari penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada jaringan organisasi dalam seleksi komisaris KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Barat untuk periode 2023-2028.

Seleksi komisaris KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 dilakukan oleh tim seleksi yang terdiri dari lima akademisi, yaitu Asrinaldi sebagai ketua, Otong Rosadi, Didi Rahmadi, Alim Harun Pamungkas, dan Beni Kharisma Arrasuli. Kelima anggota tim seleksi tersebut merupakan akademisi dari berbagai universitas, antara lain Unand, Ekasakti, UM Sumbar, dan UNP, serta berasal dari berbagai organisasi, seperti HMI, GMNI, PMII, dan NU. Data lima komisaris KPU Sumatera Barat terpilih tahun 2023 adalah Surya Efitrimen sebagai ketua, Ory Sativa Syakban, Medo Patria, Jons Manedi, dan Hamdan. Komisaris KPU terpilih tersebut juga memiliki latar belakang organisasi yang berbeda, antara lain HMI, PMII, IMM, Muhammadiyah, dan NU. Tabel di bawah ini menunjukkan data panitia seleksi dan komisaris KPU Provinsi Sumatera Barat terpilih untuk periode 2023-2028.

Tabel 1.
Data Komite Seleksi KPU Sumatera Barat 2023

No	Nama	Jabatan	Organisasi	Akademisi Kampus
1	Asrinaldi	Ketua	HMI	Unand
2	Otong Rosadi	Sekretaris	HMI/NU	Ekasakti
3	Didi Rahmadi	Anggota	HMI	UM Sumbar
4	Alim Harun Pamungkas	Anggota	GMNI/NU	UNP
5	Beni Kharisma Arrasuli	Anggota	PMII/NU	Unand

Sumber: Data sekunder yang diolah oleh peneliti dari berbagai sumber pada tanggal 23 September 2024.

Tabel 2.
Data Komisioner Terpilih KPU Sumatera Barat Periode 2023-2028

No	Nama	Jabatan	Organisasi	Pekerjaan Sebelumnya
1	Surya Efitrimen	Ketua	HMI	Ketua Bawaslu Sumbar
2	Ory Sativa Syakban	Anggota	PMII/NU	Anggota KPU Padang Pariaman
3	Medo Patria	Anggota	HMI	Anggota KPU Pesisir Selatan
4	Jons Manedi	Anggota	IMM/Muhammadiyah	Anggota KPU Kab. Solok
5	Hamdan	Anggota	HMI/NU	Ketua Bawaslu Tanah Datar

Sumber: Data sekunder yang diolah oleh peneliti dari berbagai sumber pada tanggal 23 September 2024.

Tabel 3.
Data Komite Seleksi KPU untuk Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2023

No	Daerah	Nama	Organisasi
1	Sumbar 1	Syaiful Anwar	HMI
		Zawil Huda	HMI/NU
		Firdaus	HMI
		Joni Zulhendra	PMII/NU
		Hardi Putra Wirman	HMI
2	Sumbar 2	Reno Fernandes	HMI
		Pudia M. Andika	HMI
		Aidil Auliya	PMII
		Ilham	IMM/Muhammadiyah
		Ulya	HMI
3	Sumbar 3	Wirdanengsih	HMI
		M Taufan	HMI
		Andri Rusta	-
		Malse Yulivestra	PMII dan NU
		M Taufik	HMI

Sumber: Data sekunder yang diolah oleh peneliti dari berbagai sumber pada tanggal 19 Desember 2024.

Tabel 4
Data Komisoner Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Nama	Organisasi
1	Kabupaten Agam	Herman Susilo	HMI/NU
		Lizawati Fitri	GMNI
		Nining Erlina Fitri	Jaringan HMI/NU
		Zainal Abadi	HMI
		Zainal Fatli	HMI
2	Kabupaten Dharmasraya	France Putra	HMI
		Hanna Citra Utami TB	-
		Henny Wardany	NU
		John Indra	NU
		Wirli Iswandi	HMI
3	Kabupaten Kep. Mentawai	Saudara Holomoan Pardede	GMNI
		Eki Butman	HMI

		Kurnia Illahi	NU
		Sunarno	NU
		Suryandika	Jaringan GMNI
4	Kabupaten Lima Puluh Kota	Okto Rizaldi	HMI
		Rozi Wan	PMII/NU
		Syafrizal	HMI
		Wendi Ahmad Wahyudi	GMNI
		Zumaira	HMI
5	Kabupaten Padang Pariaman	Zainal Abidin	PMII
		Doni Eka Putra	HMI/NU
		Roza Mendes	HMI/NU
		Sultan Syarif Hidayat	PMII
		Winda Arianti	GMNI
6	Kabupaten Pasaman	Taufiq	HMI/NU
		Elvie Syafni	HMI
		Julia Yusrant	HMI
		Sulastri	GMNI
		Yansuardi	NU
7	Kabupaten Pasaman Barat	Alfi Syahrin	Muhammadiyah
		Akbar Riyadi	HMI
		Fitri Wati	HMI
		Hafizul Pahmi	PMII
		Syarif Hidayatullah	HMI
8	Kabupaten Pesisir Selatan	Aswandi	HMI
		Dede Desmana	Jaringan GMNI
		Rahmat	Jaringan GMNI
		Ruswandi Rinaldo	-
		Syafrizal Chan	HMI
9	Kabupaten Sijunjung	Dori Kurniadi	GMNI/NU
		Bayu Agung Perdana	HMI
		Juni Wandri	HMI
		Ria Meilani	HMI
		Susila Andica	PMII/NU
10	Kabupaten Solok	Hasbullah Alqomar	PMII/NU
		Defil	HMI
		Despa Wandri	HMI
		Novialdi Putra	HMI
		Si'o	GMNI
11	Kab. Solok Selatan	Ade Kurnia Zelli	HMI
		Dedi Fitriadi	GMNI/Muhammadiyah
		Elvira Roza	PMII/NU
		Novia Syahfitri	HMI
		Syaiful Amri	HMI
12	Kabupaten Tanah Datar	Dicky Andrika	GMNI
		Gusriyono	NU
		Ikhwan Arif	HMI/Muhammadiyah
		Nini Karlina	GMNI
		Tomas Hendriko	HMI/NU
13	Kota Bukittinggi	Satria Putra	HMI
		Muhammad Fauzan Harza	HMI
		Muhammad Utche Pradana	GMNI
		Rifa Yanas	HMI/NU

		Safri Miswardi	GMNI
14	Kota Payakumbuh	Wizri Yasir	NU
		Ihsanul Huda	GMNI
		Khairudin Fambo	HMI
		Orisko Zulkifli	HMI
		Suci Wildanis	HMI
15	Kota Solok	Ariantoni	GMNI
		Abdul Hanan	GMNI/NU
		Dessy Arisandi	Jaringan GMNI
		Tomi Farto	HMI
		Yance Gafar	HMI

Sumber: Data sekunder yang diolah oleh peneliti dari berbagai sumber pada tanggal 11 Desember 2024.

Sebanyak 19 anggota panitia seleksi dan 78 komisioner dari provinsi dan kabupaten/kota dengan latar belakang organisasi, berdasarkan asumsi bahwa calon komisioner harus memiliki jaringan organisasi dan politik. Dalam jaringan organisasi untuk seleksi komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 pada Tabel 1 dan dihubungkan dengan pola organisasi komisioner KPU Kabupaten/Kota Sumatera Barat tahun 2023 pada Tabel 3, urutannya adalah pertama HMI, kedua NU, ketiga GMNI, keempat PMII, kelima Muhammadiyah, dan keenam IMM. Diasumsikan bahwa terdapat jaringan politik organisasi dan bahwa jaringan tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap seleksi komisioner KPU untuk provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat periode 2023-2028.

Fenomena ini menjadi fokus diskusi dalam konteks ini, karena ketika diamati dalam organisasi, baik jaringan alumni organisasi mahasiswa maupun organisasi pemuda (OKP) dan organisasi masyarakat berbasis Islam, terdapat jaringan politik antara tim seleksi dan calon komisaris KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat periode 2023-2028, hingga proses seleksi dan pemilihan komisaris. Selain itu, tentu ada hubungan timbal balik antara organisasi, tim seleksi, dan komisaris KPU provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori jaringan politik David Knoke, yang relevan dalam menggambarkan jaringan organisasi dalam seleksi komisaris. Pertanyaan penelitian dalam diskusi ini adalah bagaimana jaringan organisasi dalam proses seleksi komisaris KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat periode 2023-2028?

Tujuan dari diskusi ini adalah untuk menggambarkan jaringan organisasi dalam proses seleksi komisaris KPU tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat untuk periode 2023-2028.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam pendekatan ini adalah studi kasus. Menurut Robert K. Yin, studi kasus adalah metode yang digunakan dalam penelitian, khususnya penelitian sosial dan politik, yang bercirikan ketidakmampuan peneliti untuk sepenuhnya mengendalikan fenomena yang diteliti. Studi kasus intrinsik cocok untuk pembahasan ini karena bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kasus yang diteliti. Studi kasus intrinsik akan digunakan untuk meneliti jaringan organisasi dalam seleksi komisioner KPU tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat untuk periode 2023-2028. Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah purposive sampling. Teknik ini paling tepat digunakan karena membutuhkan aktor yang benar-benar ahli dalam pemilihan komisioner KPU. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pertama, wawancara. Melalui wawancara, mudah untuk meneliti segala sesuatu yang diketahui informan secara mendalam (Mar'atusholihah & Priyanto, 2019: 7). Dalam pembahasan ini, Provinsi Sumatera Barat menjadi fokus utama. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat dipilih sebagai lokasi penelitian. KPU kabupaten/kota di Sumatera Barat yang dipilih adalah Kabupaten Agam, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Tanah Datar. Lebih lanjut, alasan pemilihan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sebagai lokasi penelitian adalah fokus pembahasan pada 5 komisioner KPU Provinsi dan 15 komisioner KPU Kabupaten Agam, Sijunjung, dan Tanah Datar di Sumatera Barat untuk periode 2023-2028.

3. Hasil dan Pembahasan

Seleksi komisaris KPU Sumatera Barat periode 2023-2028 ditandai dengan banyaknya tim seleksi dan calon komisaris dari latar belakang organisasi, seperti KPU Sumatera Barat, KPU Agam, KPU Sijunjung, dan KPU Tanah Datar. Banyaknya komisaris dari organisasi disebabkan oleh fakta bahwa jabatan komisaris berkaitan dengan masyarakat dan lingkungan, dan pemilihan merupakan kegiatan demokratis yang membutuhkan pengalaman organisasi. Hal ini disampaikan oleh Bapak Malse, anggota tim seleksi KPU Sumatera Barat 3 dari Universitas Andalas, yang juga terlibat dalam organisasi PMII dan NU. Bapak Bayu, komisaris KPU Sijunjung dari organisasi HMI, juga mengatakan bahwa banyak komisaris yang lulus dari organisasi berhasil karena pengalaman, kepemimpinan, dan kemampuan komunikasi mereka.

Organisasi ini memiliki jaringan yang kuat dalam proses seleksi komisioner, sehingga mampu membantu dan menentukan seleksi kandidat baik di tingkat komite seleksi maupun KPU RI. Komisioner dari organisasi ini tidak hanya memiliki keterampilan yang dibutuhkan tetapi juga memiliki jaringan, sehingga

organisasi-organisasi pendukung para komisioner ini membantu dalam proses seleksi dengan menjalin komunikasi dengan komite seleksi dan KPU RI. Bentuk komunikasi yang terjalin bersifat formal atau informal, langsung atau tidak langsung, seperti pertemuan antar organisasi, pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek), dan melalui telepon atau pesan teks. Komunikasi ini sangat terstruktur, menghubungkan kandidat komisioner, tim seleksi, pimpinan organisasi, dan komisioner KPU RI.

Ibuk Wirda, ketua tim seleksi KPU Sumatera Barat 3 dari Universitas Negeri Padang bersama organisasi HMI, menyampaikan bahwa komunikasi terjalin secara langsung dan tidak langsung antara calon komisioner dan organisasi. Bapak Yogi, ketua Asosiasi Alumni GMNI Sumatera Barat, mengatakan bahwa GMNI mengadakan pertemuan dan pelatihan bimbingan teknis bagi calon komisioner yang akan melaksanakan seleksi. Bapak Herman, selaku Ketua Agam KPU dari organisasi HMI dan NU, mengatakan bahwa dalam mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam seleksi komisioner, terdapat instruksi dan bantuan dari senior HMI untuk bertemu dengan senior HMI lainnya dan berkomunikasi dengan komisioner KPU RI, serta mereka diminta untuk mengikuti pelatihan teknis di Komite Pengawas Pemilu Independen (KIPP).

Berdasarkan hal tersebut, jelas terlihat bahwa organisasi memainkan peran penting dalam seleksi dan pembentukan jaringan. Misalnya, Komite Seleksi Provinsi Sumatera Barat, Sumbar 1 hingga Sumbar 3, seluruhnya terdiri dari orang-orang dari organisasi, kecuali satu orang. Hal ini juga dibuktikan dengan fakta bahwa para komisioner terpilih di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Tanah Datar semuanya merupakan anggota organisasi yang terlibat dalam jaringan alumni organisasi mahasiswa atau organisasi pemuda (OKP) seperti HMI, GMNI, PMII, dan IMM, serta organisasi masyarakat Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang digunakan oleh peneliti, pertama, Yudho Wahyanto dan Yusa Djuyandi dengan judul "Dinamika dan Keterlibatan Organisasi Masyarakat dalam Proses Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Tingkat Daerah (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2018)" yang menemukan bahwa kader dengan latar belakang organisasi masyarakat yang mengendalikan modal dan habitus secara tidak langsung memiliki peluang lebih besar untuk menjadi anggota KPU. Kedua, Muh. Alwi Parhanudin dan Miftahul Janah dengan judul "Hubungan Kekuasaan dalam Perebutan Jabatan Komisioner Bawaslu di Kota Mataram Periode 2018-2023" dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat tiga bentuk hubungan kekuasaan dalam pengisian jabatan komisioner, termasuk (1) memberikan rekomendasi, (2) menentukan nama panitia seleksi dan

konsolidasi, dan (3) komunikasi berkelanjutan dengan Komisioner Bawaslu Indonesia.

Tabel berikut menunjukkan jumlah dan saluran rekomendasi organisasi yang digunakan dalam pemilihan komisaris KPU tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat untuk periode 2023-2028.

Tabel 5.
Jumlah dan Jalur Rekomendasi untuk Anggota KPU Sumatera Barat Periode 2023–2028

Daerah	Nama	Jalur 1	Jalur 2	Total
Provinsi Sumatera Barat	Surya Efitrimen (HMI)	GMNI		1
	Ory Sativa Syakban (PMII/NU)	PMII	NU	2
	Medo Patria (HMI)	HMI		1
	Jons Manedi (IMM/Muhammadiyah)	IMM	Muhammadiyah	2
	Hamdan (HMI/NU)	GMNI		1
Kabupaten Agam	Herman Susilo (HMI/NU)	HMI	NU	2
	Lizawati Fitri (GMNI)	GMNI		1
	Nining Erlina Fitri (Jaringan HMI/NU)	HMI		1
	Zainal Abadi (HMI)	HMI		1
	Zainal Fatli (HMI)	HMI		1
Kabupaten Sijunjung	Dori Kurniadi (GMNI/NU)	GMNI		1
	Bayu Agung Perdana (HMI)	HMI		1
	Juni Wandri (HMI)	HMI		1
	Ria Meilani (HMI)	HMI		1
	Susila Andica (PMII/NU)	PMII	NU	2
Kabupaten Tanah Datar	Dicky Andrika (GMNI)	GMNI		1
	Gusriyono (NU)	NU		1
	Ikhwan Arif (HMI/Muhammadiyah)	HMI	Muhammadiyah	2
	Nini Karlina (GMNI)	GMNI		1
	Tomas Hendriko (HMI/NU)	HMI		1

Sumber: Data primer yang diolah oleh peneliti dari berbagai sumber pada 22 Mei 2025.

Saluran rekomendasi organisasi yang digunakan oleh para komisioner KPU mencakup mereka yang menggunakan organisasi 1 dan 2. Lebih lanjut, latar belakang organisasi para komisioner dominan dalam penggunaan jaringan, dan ada komisioner yang menggunakan jaringan di luar latar belakang organisasi mereka. Organisasi dengan ideologi serupa, seperti PMII dan NU atau IMM dan Muhammadiyah, dapat digunakan secara bersamaan dalam penggunaan jaringan karena memiliki latar belakang yang sama. Organisasi seperti HMI atau GMNI tidak dapat dikombinasikan dalam penggunaan jaringan organisasi dengan organisasi lain dalam seleksi komisioner KPU.

Jaringan yang lebih terhubung antar organisasi memungkinkan pertukaran informasi dan sumber daya yang lebih lancar. Oleh karena itu, para komisioner menggunakan lebih dari satu rekomendasi dan saluran organisasi untuk

memfasilitasi komunikasi dengan panitia seleksi dan Komisi Pemilihan Umum Indonesia (KPU RI). Semakin banyak rekomendasi yang dimiliki suatu organisasi, semakin tinggi peluangnya untuk lolos proses seleksi. Namun, dalam proses tersebut, organisasi tidak boleh saling bertentangan, dan pada akhirnya hanya satu rekomendasi dan saluran organisasi yang digunakan untuk mencapai KPU RI. Secara keseluruhan, jumlah jaringan yang digunakan dalam rekomendasi berasal dari satu atau dua organisasi.

Jaringan ini dapat dihitung berdasarkan berapa banyak koneksi yang dibutuhkan untuk saling terhubung di dalam jaringan. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut: pertama, organisasi merekomendasikan tim seleksi regional kepada KPU RI. Kedua, organisasi melakukan proses seleksi untuk merekomendasikan kandidat komisaris KPU regional. Ketiga, organisasi memberikan rekomendasi komisaris KPU kepada tim seleksi dan KPU RI melalui saluran formal dan informal.

Salah satu organisasi yang memberikan rekomendasi untuk panitia seleksi KPU RI adalah GMNI. Asosiasi Alumni (PA) GMNI Sumatera Barat merekomendasikan beberapa tim seleksi kepada KPU RI melalui PA GMNI pusat. Bapak Ilham, sebagai anggota tim seleksi KPU Sumatera Barat 3 dari organisasi IMM dan Muhammadiyah, menyatakan bahwa KPU RI tidak membuka proses rekrutmen tim seleksi kepada publik, dan Yogi Yolanda, Ketua PA GMNI Sumatera Barat, meminta persetujuan untuk direkomendasikan sebagai anggota tim seleksi KPU.

Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Muh. Alwi Parhanudin dan Miftahul Janah, yang menemukan bahwa relasi kekuasaan yang terlibat dalam pengisian posisi komisioner berbentuk rekomendasi, pemilihan anggota komite seleksi, dan konsolidasi. Penelitian ini menemukan bahwa organisasi memberikan rekomendasi dan memilih anggota komite seleksi, dan bahwa organisasi melakukan konsolidasi.

Faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan jaringan rekomendasi komisioner KPU adalah kesamaan ideologi antar organisasi dan kepentingan bersama. Organisasi seperti HMI, GMNI, PMII, IMM, Muhammadiyah, dan NU memiliki ideologi yang berbeda. Setiap organisasi merekomendasikan komisioner KPU sesuai dengan ideologi antara organisasi, komisioner KPU, dan Tim Seleksi (timsel). Ibu Wirda, selaku Ketua Tim Seleksi KPU Sumbar 3 dari akademisi Universitas Negeri Padang bersama organisasi HMI, menyatakan bahwa jaringan tersebut terbentuk karena adanya ikatan ideologi antar organisasi.

Rekomendasi dibuat oleh organisasi berdasarkan ideologi dan kepentingan bersama dalam regenerasi dan perjuangan untuk organisasi tersebut. Oleh karena itu, nama-nama yang direkomendasikan oleh organisasi kepada tim

seleksi pun muncul. Hal ini dikonfirmasi oleh Bapak Andri, seorang narasumber triangulasi dan anggota tim seleksi KPU 3 Sumatera Barat dari Universitas Andalas, yang mengatakan bahwa memang ada banyak kepentingan dan rekomendasi.

Hal ini diperkuat oleh penelitian Masum Busthomi dan M. Iwan Satriawan yang berjudul "Dinamika Pengaruh Organisasi Masyarakat dalam Mengisi Anggota KPU di Daerah" dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa praktik pemilihan komisaris KPU tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pribadi tetapi juga dipengaruhi oleh ideologi organisasi masyarakat dalam tim seleksi. Oleh karena itu, komposisi tim seleksi dari suatu organisasi masyarakat akan memengaruhi jumlah calon komisaris KPU terpilih yang memiliki ideologi yang sama dengan organisasi masyarakat tersebut.

Jaringan berpengaruh selain organisasi dalam memberikan rekomendasi untuk komisioner KPU di Sumatera Barat, ideologi organisasi, dan deposito adalah asosiasi alumni, hubungan keluarga, dan hubungan daerah. Ibuk Wirda, selaku ketua Tim Seleksi KPU Sumatera Barat 3 dari akademisi Universitas Negeri Padang bersama organisasi HMI, menyampaikan urutan penentuan rekomendasi, yang didasarkan pada urutan ideologi organisasi, asosiasi alumni departemen dan kampus, hubungan kekerabatan, dan satu lokasi daerah.

Organisasi-organisasi yang berpengaruh selain jaringan alumni organisasi mahasiswa atau Organisasi Pemuda (OKP) dan organisasi masyarakat berbasis Islam adalah Komite Pengawas Pemilu Independen (KIPP). Bapak Fuad, selaku Ketua KIPP dari organisasi HMI, mengatakan bahwa banyak peserta pelatihan Bimbingan Teknis (bimtek) KIPP yang lolos seleksi komisioner KPU di kabupaten/kota di Sumatera Barat. Selain itu, KIPP juga mengeluarkan Keputusan (SK) yang merekomendasikan komisioner kepada tim seleksi.

Partai politik juga memengaruhi pemilihan komisioner KPU. Partai politik secara tidak langsung terlibat dalam merekomendasikan komisioner KPU. Di tingkat pusat KPU RI, tim seleksi KPU RI dipilih oleh Komisi II DPR RI, kemudian Komisi II DPR RI juga memilih komisioner KPU RI dan menyerahkannya kepada Presiden untuk disetujui. Menurut para peneliti, Komisi II DPR RI terdiri dari orang-orang yang aktif terlibat dalam partai politik, dan terdapat kepentingan partai secara tidak langsung dalam pemilihan komisioner KPU RI. Hal ini memengaruhi tingkat daerah, yang tidak kebal terhadap proses politik di tingkat pusat. Tim seleksi dipilih langsung oleh komisioner KPU RI, dan komisioner di tingkat daerah juga dipilih oleh komisioner KPU RI. Ibuk Wirda, ketua tim seleksi KPU Sumatera Barat 3 dari Universitas Negeri Padang dengan organisasi HMI, mengatakan bahwa partai-partai mempengaruhi dan menggunakan organisasi sebagai latar belakang.

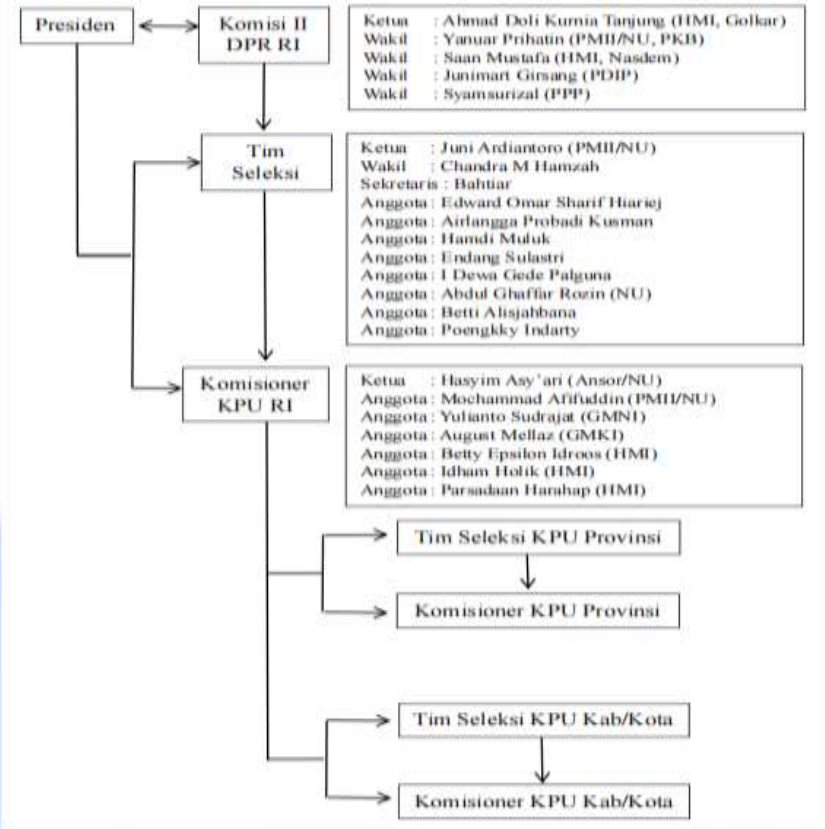
Para kandidat komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat yang lolos seleksi 10 besar namun gagal masuk 5 besar di KPU RI disebabkan oleh keterlibatan istana (pemerintah/partai politik) dalam menentukan komisioner KPU. Misalnya, SAF melaporkan keterlibatan istana. Keterlibatan dan pengaruh partai politik serta afiliasi dalam seleksi komisioner KPU dikonfirmasi oleh Bapak Yusa, seorang akademisi di Universitas Padjadjaran, yang mengatakan bahwa beberapa individu memiliki afiliasi dengan partai politik.

Pola Jaringan Organisasi

Proses seleksi komisioner KPU dimulai dengan Tim Seleksi (timsel) mengajukan nama-nama kepada Presiden, yang kemudian meneruskannya ke Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) melalui Komisi II untuk dilakukan uji kelayakan. DPR RI memilih tujuh komisioner KPU dari 14 nama yang diajukan oleh tim seleksi. Proses seleksi ini tidak terlepas dari pengaruh partai politik, di mana seleksi akhir dilakukan oleh DPR RI, yang sebenarnya terdiri dari anggota partai politik, dan kemudian disetujui oleh Presiden. Seleksi komisioner tentu dipengaruhi oleh kepentingan partai politik.

Komisaris KPU tingkat provinsi dan kabupaten/kota dipilih oleh tim seleksi yang ditunjuk langsung oleh KPU RI. Penunjukan ini berbeda dari proses seleksi sebelumnya, di mana tim seleksi mengajukan anggotanya ke KPU RI untuk seleksi dan penunjukan. Tim seleksi yang ditunjuk oleh KPU RI memilih 10 kandidat untuk komisaris KPU tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yang kemudian diajukan ke KPU RI untuk seleksi dan penunjukan 5 komisaris. Alur jaringan dalam seleksi komisaris KPU RI, provinsi, dan kabupaten/kota tahun 2022-2023, beserta latar belakang organisasinya, dapat dilihat pada bagan berikut.

Gambar 2.
Alur Jaringan dalam Seleksi Komisioner KPU dan Latar Belakang Organisasi



Alur jaringan dalam seleksi komisioner KPU, yang meliputi pimpinan Komisi II DPR Indonesia, beberapa tim seleksi, dan komisioner KPU, terdiri dari individu-individu yang merupakan anggota organisasi. Jaringan organisasi ini telah terbentuk sejak awal proses seleksi komisioner KPU, dengan pimpinan Komisi II DPR Indonesia berasal dari latar belakang organisasi selain partai politik. Akibatnya, komisioner KPU yang terpilih juga berasal dari organisasi. Hal ini berdampak pada seleksi komisioner KPU untuk provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat periode 2023-2028, di mana tim seleksi dan komisioner terpilih adalah orang-orang dengan latar belakang organisasi. Bapak Zainal Abadi, seorang komisioner KPU Agam dari organisasi HMI, mengatakan bahwa latar belakang organisasi komisioner KPU RI akan memengaruhi komisioner KPU untuk provinsi dan kabupaten/kota.

Kontroversi seputar nama-nama komisioner Komisi Pemilihan Umum Indonesia (KPU RI) pada seleksi 2022 bermula dengan beredarnya pesan berantai yang berisi nama-nama komisioner terpilih sebelum dilakukannya uji kelayakan. Pesan berantai tersebut beredar berisi nama-nama kandidat KPU dan Bawaslu yang disepakati oleh koalisi pemerintah, padahal itu baru hari

pertama uji kelayakan. Berikut adalah tabel organisasi dan dugaan afiliasi partai politik para komisioner KPU RI untuk periode 2022-2027.

Tabel 6.
Organisasi dan Dugaan Afiliasi Partai Politik Komisioner Komisi Pemilihan Umum Indonesia Periode 2022-2027

No	Nama	Organisasi	Afiliasi
1	Prasadaan Harahap	HMI	Golkar
2	Idham Holik	HMI	Nasdem
3	Betty Epsilon Idroos	HMI	Nasdem
4	August Mellaz	GMKI	PDIP
5	Yulianto Sudrajat	GMNI	PDIP
6	Mochammad Afifuddin	PMII/NU	PKB
7	Hasyim Asy'ari	Ansor/NU	Gerindra

Sumber: Data sekunder yang diperoleh peneliti dari Jawa Pos pada 2 Mei 2025.

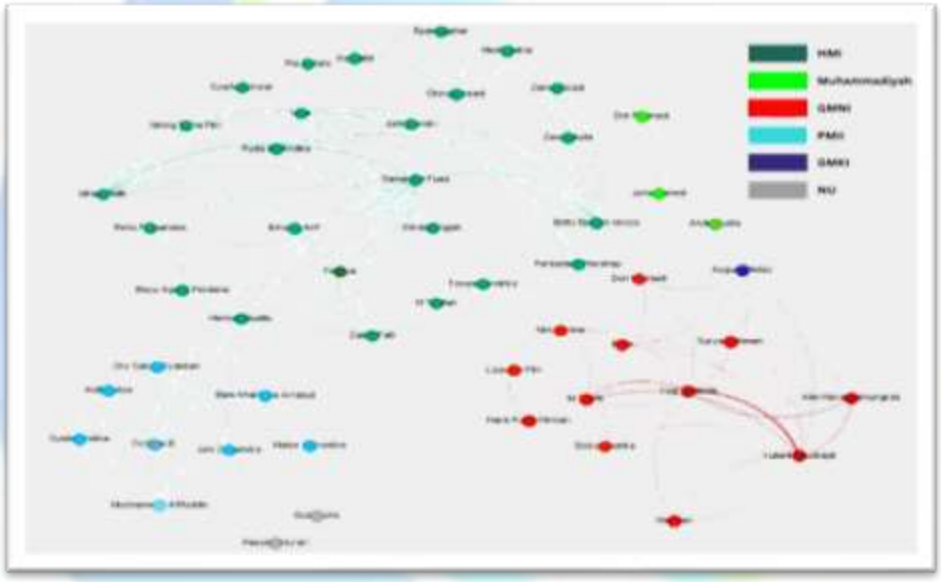
Ketua tim seleksi KPU Sumatera Barat 3 dari Universitas Negeri Padang dan organisasi HMI Bu Wirda, mengatakan bahwa ada partai politik yang mempengaruhi dan menyusup ke dalam organisasi. Bapak Yusa, seorang akademisi dari Universitas Padjadjaran, mengatakan bahwa komisioner terpilih yang dibantu partai politik memberikan bantuan kepada partai politik, seperti memfasilitasi kegiatan politik. Proses seleksi komisioner KPU RI tentu berdampak pada proses seleksi komisioner KPU provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat pada tahun 2023. Proses seleksi, dengan keterlibatan partai politik dan jaringan organisasi, mempengaruhi seleksi di daerah tersebut. Hal ini dapat dilihat pada komisioner terpilih, khususnya komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat, KPU Kabupaten Agam, KPU Kabupaten Sijunjung, dan KPU Kabupaten Tanah Datar, karena semuanya memiliki latar belakang organisasi. Tentu saja, jaringan organisasi memainkan peran penting dalam seleksi komisioner, karena jaringan organisasi memiliki komunikasi dengan tim seleksi dan akses ke partai politik dan komisioner KPU RI.

Jaringan organisasi tidak dapat dipisahkan dari tokoh-tokoh organisasi yang membantu dalam proses seleksi. Misalnya, pertama, HMI, Epaldi Bahar, sebagai mantan Ketua Pesisir KPU Selatan periode 2013-2018 dan 2018-2023, juga dikenal memiliki koneksi dengan Betty Epsilon Idroos, seorang komisioner KPU Indonesia, dan Samaratul Fuad, Ketua Komite Pengawas Pemilu Independen (KIPP) Provinsi Sumatera Barat, yang memiliki koneksi dengan KIPP pusat. Kedua, GMNI, Yogi Yolanda sebagai Ketua Asosiasi Alumni GMNI Sumatera Barat (PA) dan Ketua Badan Kampanye Pemilu PDIP Sumatera Barat (bappilu). Ketiga, PMII dan NU, Firdaus sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Alumni PMII Sumatera Barat (IKA) dan Ketua Dewan Eksekutif Daerah PKB Sumatera Barat (DPW). Dan keempat, IMM dan Muhammadiyah, Ilham sebagai anggota panitia seleksi KPU Sumatera Barat nomor 2 dan Wakil Ketua Divisi Pengembangan

Kader Muhammadiyah Sumatera Barat serta Didi Rahmadi sebagai anggota panitia seleksi KPU Provinsi Sumatera Barat.

Para pemimpin organisasi-organisasi ini memiliki jaringan dengan panitia seleksi, partai politik, dan komisioner KPU, sehingga banyak calon komisioner berkomunikasi dengan para pemimpin organisasi untuk meminta bantuan. Jaringan organisasi ini didasarkan pada latar belakang para pemimpin organisasi, panitia seleksi, calon komisioner, partai politik, dan komisioner KPU. Berikut adalah gambaran Analisis Jaringan Sosial (SNA) dari jaringan organisasi dalam seleksi komisioner KPU tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat periode 2023-2028.

Gambar 3.
Analisis Jaringan Sosial (SNA) dari Jaringan Organisasi



Sumber: Data primer yang diproses oleh peneliti menggunakan aplikasi Gephi pada 25 Mei 2025.

Jaringan organisasi komisaris KPU di Sumatera Barat periode 2023-2028 menunjukkan bahwa organisasi memainkan peran penting dengan kehadiran tokoh organisasi sebagai jembatan dalam jaringan dalam seleksi komisaris KPU. Terlihat bahwa jaringan organisasi cenderung relatif serupa dengan organisasi lain, seperti komisaris KPU yang berasal dari HMI direkomendasikan oleh tokoh organisasi, tim seleksi, dan komisaris KPU RI dari organisasi yang sama. Hal yang sama berlaku untuk organisasi GMNI, PMII, dan NU, sedangkan organisasi IMM dan Muhammadiyah tidak begitu dominan dalam proses seleksi. Namun, ada jaringan organisasi yang merekomendasikan komisaris KPU di luar organisasi mereka sendiri, seperti GMNI merekomendasikan komisaris KPU dari HMI. Bapak Andri, sebagai anggota panitia seleksi KPU Sumatera Barat 3 dari

Universitas Andalas, mengatakan bahwa ada istilah untuk ini, yaitu semangka, komisaris dari HMI yang mendapat rekomendasi dari GMNI.

Pengelompokan aktor berdasarkan jaringan organisasi dalam pemilihan komisaris KPU, dengan total 23 HMI, 11 GMNI, 7 PMII, 2 IMM, 6 Muhammadiyah, dan 14 NU. Terdapat 44 aktor yang terlibat dalam pemilihan ini, terdiri dari komisaris KPU, tokoh organisasi, dan tim seleksi. Analisis Jaringan Sosial (SNA) dari jaringan organisasi dalam pemilihan komisaris KPU menunjukkan bahwa hubungan antara aktor dan organisasi dalam jaringan tersebut saling terkait. Aktor-aktor ini terlibat dalam pemilihan komisaris KPU, yang sepenuhnya didasarkan pada jaringan organisasi, dan organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemilihan dan pengangkatan komisaris KPU.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian yang dibahas dalam makalah ini dapat diringkas sebagai berikut: terdapat jaringan politik organisasi dan rekomendasi dari organisasi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pemilihan komisaris KPU provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat untuk periode 2023-2028. Aktor dalam jaringan ini adalah, pertama, calon komisaris KPU; kedua, Tim Seleksi (timsel); ketiga, pimpinan organisasi; keempat, komisaris KPU RI; dan kelima, partai politik. Jaringan organisasi yang dominan adalah HMI, GMNI, dan PMII. Aktor dari jaringan organisasi ini memiliki pengaruh yang hampir sama, sehingga distribusi komisaris KPU provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat untuk periode 2023-2028 terdistribusi merata di antara organisasi-organisasi tersebut. Lebih lanjut, Analisis Jaringan Sosial (SNA) dari jaringan organisasi yang terbentuk cenderung lebih berupa rekomendasi dari sesama organisasi. Namun, ada juga organisasi yang memberikan rekomendasi di luar organisasinya. Selain itu, terdapat unsur kepentingan dalam memberikan rekomendasi untuk komisaris KPU. Pembahasan ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan dan kedalaman penelitian. Pertama, diharapkan penelitian selanjutnya akan mengkaji jaringan organisasi Tim Seleksi (timsel). Kedua, disarankan agar penelitian berfokus pada satu organisasi dalam seleksi komisaris KPU. Ketiga, disarankan untuk mengkaji afiliasi organisasi dan partai politik dalam seleksi komisaris KPU dari perspektif kepentingan dan keuntungan. Dan keempat, disarankan untuk mengkaji aspek transparansi dan profesionalisme dalam seleksi komisaris KPU.

Daftar Pustaka

Amal, I. (1996). Teori Partai Politik (*Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta.

Asnur, R., P., Yakub, A., & Kambo, G., A. (2020). Dinamika Rekrutmen Proses untukKPU Provinsi Sulawesi Barat Komisaris pada tahun 2018. *Jurnal Noken, 6(1)*,23-35.

Asshidiqie, J. (2012). Hukum Tata Negara &*Pilar-Pilar Demokrasi.* Jakarta: Sinar Grafik.

Banu Adikara, (2022). Diakses pada 2 Mei 2025 dari https://www.jawapos.com/politik/amp/01 370488/polemik- nama-nama-dari anggota terpilih dari badan pengawas pemilu komisi-komisi-ii-Secara kebetulan.

Budiarjo, M. (2021). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Budiyono, K. (2012). Teori dan Filsafat *Ilmu Politik.* Bandung: Alfabeta.

Bungin, B. (2003). Data Penelitian Kualitatif *Analisa.* Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada.

Busthomi, M & Satriawan, M, I. (2020). Itu Dinamika Pengaruh Masyarakat Organisasi dalam Pengisian KPU Keanggotaan di Wilayah-Wilayah.*Jurnal Isu Politik, 2(1)*, 24.

Djuyandi, Y., Firdaus, M., & Hidayat, A. (2018). Peran KomunitasOrganisasi di Pengisian Posisi di YogyakartaPemilihan Lembaga Pengawas: Sebuah Studi tentang Peran Nahdlatul Ulama danmuhammadiyah. Jurnal Wacana Politik, *3(2)*, 108-120.

Knoke, D. (1994). Jaringan Politik: *Perspektif Struktural* Amerika Serikat. Amerika: Cambridge University Press.

Luthfie, M. (2018). Organisasi Komunitas Jaringan Komunikasi di Jurnal Pembangunan Sosial *Ilmu Humaniora, 9(1)*, 18.

Maulana, A., R., & Iqomah, R. (2024). Murid Keterampilan Negosiasi Organisasi dalam Bersaing untuk Menjadi Penyelenggara PemiluPosisi di Pangandaran Daerah. *Jurnal Pendidikan dan Pemerintahan Wiyata, 2(2)*, 126-133.

Parhanudin, A & Jannah, M. (2023). Kekuatan Hubungan dalam Perebutan Jabatan Komisaris Kota Mataram Badan Pengawas Pemilu(Bawaslu) untuk tahun 2018-2023. POLITEA: Jurnal *Politik Islam, 6(2)*, 1-44.

Sania Mashabi dan Dani Prabowo. (2021). Diakses pada 2 Mei 2025 dari https://nasional.kompas.com/read/2021/1 0/11/15104461/ini-profil-11-anggota-tim-seleksi-calon-anggota-kpu-bawaslu-periode-2022?page=all.

Subadi, T. (2006). Kualitatif *Metode Penelitian*. Surakarta: Penerbit Universitas Muhammadiyah.

Wahyanto, Y & Djuyandi, Y. Dinamika Organisasi dan Keterlibatan dalam Proses Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum di Lokal Level (Studi Kasus di Pusat) Java untuk Periode 2013-2018). TAPIs *Jurnal, 15(4)*, 71.

Widodo, W. (2018). Implementasi dari Pemilihan Umum Serentak 2018 dari Perspektif Politik dan Hukum. Jurnal Meta-Yuridis, 1(1), 24.

Yin, K, R. (2011). Metode Desain Studi Kasus. Jakarta: PT Raja Grasindo Persad.